

COVID-19, KETIMPANGAN GENDER, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI EMPIRIS INDONESIA

COVID-19, GENDER INEQUALITY, AND ECONOMIC GROWTH: AN EMPIRICAL STUDY IN INDONESIA

Sulistiyowati

Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Trilogi
Jl. TMP Kalibata, DKI Jakarta, Indonesia
E-mail: sulistiyowatiara@gmail.com

Lestari Agusalm

Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Trilogi
Jl. TMP Kalibata, DKI Jakarta, Indonesia
E-mail: lestariagusalm@trilogi.ac.id

Abstrak

Ketimpangan gender merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia. Ketimpangan gender yang tinggi menjadi penghambat tercapainya pertumbuhan sosial, politik, dan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan tentunya menyebabkan kesejahteraan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak ada artinya jika diiringi dengan ketimpangan gender yang tinggi, artinya pertumbuhan tersebut tidak dinikmati oleh masyarakat secara merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Covid-19 dan ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan teknik pemilihan model *fixed effect model*, yang terdiri dari data *cross-section* 34 provinsi dan data *time-series* pada periode tahun 2015-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Covid-19 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, variabel indeks ketimpangan gender juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Selain itu, variabel indeks pembangunan gender, indeks pembangunan manusia dan pembentukan modal tetap bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sesudah Covid-19. Ada pula variabel yang tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia baik sebelum dan sesudah Covid-19, diantaranya variabel indeks pemberdayaan gender dan rasio upah laki-laki terhadap perempuan.

Kata Kunci: Covid-19, ketimpangan gender, pembangunan gender, pemberdayaan gender, pertumbuhan ekonomi

Abstract

Gender inequality is a prevalent issue faced by developing countries such as Indonesia. High gender inequality acts as a barrier to achieving sustainable social, political, and economic growth, leading to unequal well-being between men and women. The well-being of a society can be measured by economic growth. High economic growth loses its significance when accompanied by high gender inequality, as it means that the growth is not equitably distributed among the population. This study aims to analyze the influence of Covid-19 and gender inequality on economic growth in Indonesia. The analytical method employed is panel data regression analysis using the fixed effect model, which includes cross-sectional data from 34 provinces and time series data spanning from 2015 to 2021. The research findings indicate that the Covid-19 variable has a negative and significant impact on economic growth in Indonesia. Additionally, the gender inequality index variable also has a negative and significant effect on economic growth in Indonesia, both before and after the Covid-19 pandemic. Furthermore, variables such as the gender development index, human development index, and gross fixed capital formation exhibit a positive and significant influence on economic growth in Indonesia after Covid-19.

Some variables, including the gender empowerment index and the male-to-female wage ratio, do not significantly affect economic growth in Indonesia, both before and after Covid-19.

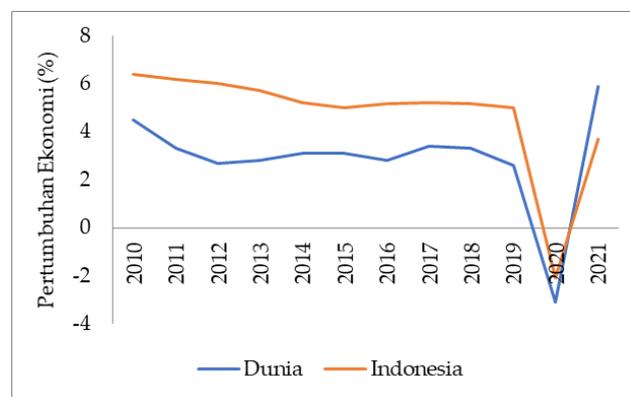
Keywords: Covid-19, gender inequality, gender development, gender empowerment, economic growth

PENDAHULUAN

Setiap negara pasti memiliki tujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi baik dalam skala nasional maupun regional. Pembangunan ekonomi di suatu negara dapat diukur dengan beberapa indikator, salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi (Harahap *et al.*, 2020). Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi tercermin dari peningkatan pendapatan negara yang ditunjukkan oleh meningkatnya kapasitas produksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu (Amory, 2019).

Gambar 1. menggambarkan pertumbuhan ekonomi dunia dan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 12 tahun terakhir yang sebagian besar mengalami tren positif sebelum adanya pandemi Covid-19. World Bank (2023) dalam laporannya menyatakan bahwa sebelum pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2019 sebesar 2,6 persen, pada tahun 2020 saat pandemi terjadi, pertumbuhan ekonomi dunia turun menjadi -3,1 persen, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi dunia membaik lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, peningkatannya mencapai 5,9 persen. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2010 hingga 2019 cenderung mengalami penurunan, hingga pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi akibat wabah Covid-19. Pada tahun 2019 sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02 persen. Saat terjadi pandemi di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia turun drastis menjadi -2,07 persen. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia perlahan membaik dan meningkat menjadi 3,70 persen. Pertumbuhan ekonomi harus disumbang oleh semua sektor ekonomi, adapun sektor yang stabil dalam menjaga

pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun antara lain sektor konsumsi rumah tangga, konstruksi, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor ini selalu berada di angka 5 persen atau lebih setiap tahunnya (Manggala, 2020). Peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 juga menandakan mulai pulihnya perekonomian sesudah pandemi Covid-19 yang tentunya didukung oleh kemajuan ekonomi di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia serta adanya program pemerintah berupa Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk melindungi, meningkatkan dan mendukung pelaku usaha selama masa pandemi Covid-19, dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat dan memulihkan perekonomian Indonesia. Program PEN tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Abidin, 2021).



Gambar 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Dunia dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sumber: World Bank dan BPS Indonesia, 2010-2021 (diolah)

Data Tahun 2020 menjadi awal yang berat bagi hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, World Health Organization (WHO) mengumumkan pada bulan Maret 2020, bahwa dunia sedang menghadapi wabah yang disebut *Corona Virus Infectious Disease 2019* atau Covid-19 (Li *et al.*, 2020). Menurut laporan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 pada akhir Desember 2022, terdapat 6,7 juta

kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia. Sebanyak 6,5 juta orang dinyatakan sembuh dari Covid-19 dan sebanyak 160 ribu orang dinyatakan meninggal dunia akibat Covid-19. Menanggapi Covid-19 yang dianggap berbahaya karena banyaknya kasus dan tingginya angka kematian, WHO menyatakan bahwa Covid-19 secara resmi dinyatakan sebagai pandemi yang bersifat global. Selain itu, WHO juga menjelaskan bahwa kondisi pandemi Covid-19 bukan hanya sekedar masalah kesehatan, namun menjadi masalah serius dalam tatanan ekonomi, sosial, politik, dan psikologis (Putri, 2020). Pemerintah Indonesia merilis kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau yang lebih dikenal dengan sebutan *lockdown* pada awal bulan April 2020, kebijakan tersebut mengharuskan seluruh kegiatan di perkantoran, sekolah, tempat ibadah, dan ruang publik ditutup (Sutrisno, 2020). Pemberlakuan kebijakan *lockdown* bertujuan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di kalangan masyarakat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan tersebut menghambat aktivitas ekonomi dan menyebabkan perubahan permintaan dan penawaran barang dan jasa. Kondisi tersebut mengakibatkan perekonomian mengalami resesi (Aeni, 2021).

Azwar dan Subekan (2016) berpendapat bahwa sebagian besar pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat umum yang memiliki golongan ekonomi lemah. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan mengakibatkan kemiskinan dan ketimpangan. Menurut Minasyan *et al.* (2019) ketimpangan gender merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Ketimpangan gender cukup besar terjadi di negara berkembang, Indonesia sebagai negara berkembang juga tidak terlepas dari isu ketidaksetaraan gender. Adika dan Rahmawati (2021) menjelaskan bahwa ketimpangan gender merupakan bentuk diskriminasi yang disebabkan oleh perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Budaya masyarakat menginterpretasikan perbedaan biologis ini

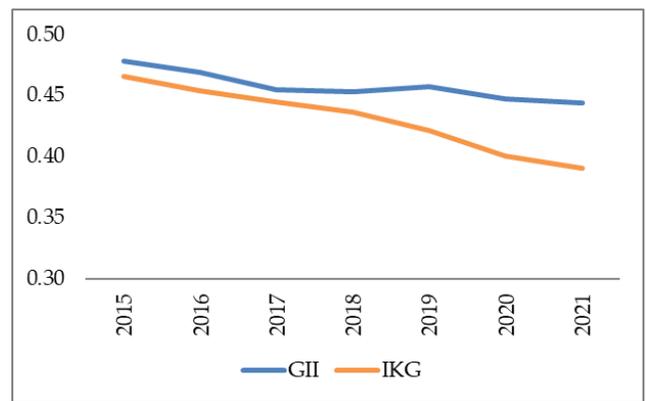
untuk menciptakan persyaratan sosial bagi kesesuaian perilaku yang pada akhirnya memengaruhi hak, sumber daya, dan kekuasaan. Padahal, kesetaraan dan berkurangnya ketimpangan merupakan indikator dalam menentukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dalam perspektif internasional, kesetaraan gender merupakan komitmen yang tertuang pada salah satu butir dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah disepakati oleh negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Indonesia sebagai tujuan ke-5 SDGs “*Gender Equality*”, yaitu “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan”. Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan dalam pembangunan berkelanjutan Indonesia yang harus diwujudkan dalam kurun waktu 15 tahun atau pada tahun 2030 (Muhartono, 2020). Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Kebijakan ini bertujuan agar semua program pembangunan nasional mengintegrasikan isu gender di dalamnya (Arjani, 2021). Namun pada kenyataannya, upaya pemerintah tersebut masih mengalami banyak tantangan dan permasalahan, terutama dengan masih adanya ketidaksetaraan gender yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan (Siscawati *et al.*, 2020).

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang tidak optimal pada pencapaian pembangunan manusia yang disebabkan oleh belum meratanya capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. IKG ini disusun oleh BPS dan merujuk pada metodologi yang digunakan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) dalam menyusun *Gender Inequality Index* (GII). Perbedaan GII UNDP dan IKG BPS terletak pada indikator yang digunakan. Dalam hal ketimpangan kesehatan, UNDP menggunakan angka kematian ibu (*maternal mortality rate/MMR*) sebagai indikator faktor risiko kematian ibu melahirkan dan tingkat fertilitas remaja (*adolescent birth rate/ABR*) sebagai indikator fertilitas remaja. BPS menggunakan indikator proporsi wanita pernah

kawin usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir tidak di fasilitas kesehatan sebagai faktor risiko kematian ibu melahirkan, sedangkan fertilitas remaja didekati dengan proporsi wanita pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama kali di usia kurang dari 20 tahun. Pada dimensi pemberdayaan, indikator pendidikan yang digunakan oleh UNDP adalah persentase penduduk berusia 25 tahun ke atas yang berijazah terakhir minimal SMP, sementara BPS menggunakan batasan minimal SMA. Menurut UNDP ketimpangan gender Indonesia tahun 2022 berada pada peringkat ke 110 dari 170 negara (Nugroho dan Clarissa, 2022).

Pada Gambar 2. memperlihatkan perbandingan ketimpangan gender di Indonesia yang diukur oleh GII UNDP dalam *Human Development Report* (HDR) dengan IKG yang dihitung oleh BPS. Dari tahun 2015 hingga 2017, ketimpangan gender menurut GII UNDP dan IKG BPS memiliki tren yang hampir sama dan menunjukkan nilai yang masih cukup tinggi. Pada tahun 2018 tren GII UNDP dan IKG BPS mulai melebar, hingga pada tahun 2020 dan 2021 terjadi pandemi Covid-19 yang membuat tren keduanya semakin melebar. Pada tahun 2020 nilai GII UNDP sebesar 0,447, angka ini lebih tinggi dari IKG BPS yang sebesar 0,400. Capaian ini berlangsung hingga tahun 2021, GII UNDP mencapai 0,444 dan IKG BPS sebesar 0,390. Perbedaan capaian antara GII UNDP dan IKG BPS disebabkan oleh perbedaan indikator yang digunakan, yaitu indikator proksi MMR, proksi ABR dan tingkat pendidikan. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang berbeda pada laki-laki dan perempuan, namun perempuanlah yang lebih banyak mengalami dampak negatif dari pandemi pada bidang ekonomi dan sosial, sehingga semakin memperburuk ketimpangan gender yang telah berkembang di masyarakat. Sejak awal pandemi, perempuan rentan dengan berbagai masalah, seperti beban ganda, kehilangan mata pencaharian, dipaksa menjadi tulang punggung keluarga, hingga mengalami kekerasan berbasis gender, permasalahan tersebut akan menghambat terciptanya kesetaraan gender (Nastiti dan Harikesa, 2023).



Gambar 2. Perkembangan GII UNDP dan IKG BPS

Sumber: UNDP dan BPS Indonesia, 2015-2021 (diolah)

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengkaji permasalahan ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi. Sari (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ketidaksetaraan gender di berbagai bidang dinilai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang melambat dinilai akan berdampak negatif terhadap pendapatan, baik di tingkat nasional maupun tingkat per kapita. Penelitian yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur oleh Hidayah dan Rahmawati (2020), menjelaskan bahwa penurunan ketimpangan gender pada aspek kesehatan dan pendidikan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kesetaraan gender dalam hal peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan akan memacu produktivitas tenaga kerja yang tinggi, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada variabel TPAK ditemukan bahwa kesetaraan gender pada aspek ketenagakerjaan tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kondisi tersebut disebabkan oleh faktor internal kualitas tenaga kerja dan faktor eksternal dukungan kebijakan pemerintah dalam hal meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai ketimpangan gender dan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh Covid-19 dan ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini penting dilakukan sebagai rujukan kepada

pemerintah untuk memastikan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi, agar negara dapat mencapai potensi pertumbuhan ekonomi yang optimal dan pembangunan yang berkelanjutan.

KAJIAN TEORITIS

Ketimpangan Gender

Gender adalah sesuatu yang terbentuk secara sosial dan bukan bentuk tubuh laki-laki atau perempuan. Gender cenderung mengacu pada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Dalam konsep gender, ada istilah yang disebut identitas gender dan ekspresi gender. Identitas gender adalah cara seseorang melihat dirinya sendiri, baik sebagai perempuan atau laki-laki. Sementara itu, ekspresi gender adalah cara seseorang mengekspresikan gendernya (manifestasi), baik melalui cara berpakaian, potongan rambut, suara, dan perilaku. Gender secara umum digambarkan sebagai feminin dan maskulin (Suryanti dan Sholikhah, 2021). Berdasarkan ideologi gender, masyarakat menciptakan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki diposisikan pada peran produktif dan publik, sedangkan perempuan diposisikan pada peran reproduktif dan domestik. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan, terutama perbedaan gender (*gender differences*), telah menyebabkan ketimpangan gender, yang umumnya lebih banyak menimpa kaum perempuan (Wiasti, 2017).

Ketimpangan gender (*gender inequalities*) adalah suatu kondisi di mana baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem gender, ketimpangan gender dapat terwujud apabila ada perlakuan yang tidak adil atau diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Keterbelakangan perempuan merupakan bukti bahwa masih ada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sejatinya, perbedaan gender dalam hal kedudukan dan peran tidak menjadi masalah selama tidak ada ketimpangan. Namun pada kenyataannya, beberapa ketimpangan tersebut lahir karena adanya perbedaan gender. Ketidaksetaraan gender biasanya merupakan dampak dari sebuah kebijakan yang didasari oleh adat istiadat, norma, atau struktur masyarakat (Afif *et al.*, 2020).

Dampak dari ketimpangan gender dapat mencakup berbagai aspek kehidupan dan memberikan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat luas, adapun dampak ketimpangan gender menurut Udzma *et al.* (2023), diantaranya adalah: (1) Marginalisasi adalah proses peminggiran karena perbedaan gender yang berakibat pada pengucilan atau pemiskinan. (2) Subordinasi adalah bentuk penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin lebih rendah dari jenis kelamin lainnya. (3) Pandangan stereotip atau pelabelan adalah gambaran standar tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris. (4) Kekerasan (*violence*) berarti tindakan kekerasan fisik atau non-fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. (5) Beban kerja berarti satu jenis kelamin menerima lebih banyak pekerjaan dibandingkan jenis kelamin lainnya.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan proses perekonomian dalam suatu negara secara berkesinambungan ke arah yang lebih baik dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Yasin, 2020). Perekonomian dapat dikatakan tumbuh apabila diikuti dengan peningkatan pada sektor ekonomi. Laju pertumbuhan pendapatan menandakan bahwa perekonomian di suatu wilayah mengalami perkembangan dan apabila terjadi perlambatan maka pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut mengalami kesulitan, apabila suatu wilayah mengalami perlambatan ekonomi maka dapat memengaruhi kehidupan sosial masyarakatnya dan apabila terjadi pertumbuhan pada sektor ekonomi maka tentunya akan berdampak positif bagi wilayah tersebut (Koilam *et al.*, 2023).

Dalam teori pertumbuhan Solow-Swan, yang juga dikenal sebagai teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dan T.W. Swan (1956), menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang

memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Teori ini juga mengasumsikan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, tanpa adanya perkembangan teknologi modern, peningkatan tersebut tidak akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara (Leasiwal, 2022).

Kemudian terdapat teori pertumbuhan endogen (*endogenous growth theory*) atau model pertumbuhan Romer yang dikembangkan pada tahun 1986, dalam teori pertumbuhan endogen didasarkan pada gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat modal manusia melalui pengembangan teknologi. Model yang paling populer dari jenis ini menyatakan bahwa penemuan-penemuan disengaja dan menghasilkan limpahan teknologi yang menurunkan biaya inovasi di masa depan dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Tentu saja dalam model ini, tenaga kerja yang terdidik memainkan peran khusus dalam menentukan tingkat inovasi teknologi. Jadi dapat disimpulkan bahwa satu-satunya cara bagi pemerintah untuk memengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang adalah melalui investasi modal, pendidikan, penelitian dan pengembangan (Nasution *et al.*, 2020).

Hubungan Ketimpangan Gender dan Pertumbuhan Ekonomi

Sejumlah studi memperlihatkan bahwa ketimpangan gender berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Kim *et al.* (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki bagaimana aspek ketidaksetaraan gender terkait dengan kinerja pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengurangan ketidaksetaraan gender berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika ketidaksetaraan gender dapat dihilangkan, maka pendapatan per kapita akan meningkat 30,2 persen lebih tinggi dari kondisi awal perekonomian setelah satu generasi dan 71,1 persen lebih tinggi setelah dua generasi.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bertay *et al.* (2020) mengungkapkan bahwa

dalam industri di mana andil perempuan tinggi, menyebabkan industri tumbuh relatif lebih cepat apabila dibarengi dengan adanya persamaan gender. Dengan memfokuskan penelitian pada perbedaan efek dari ketidaksetaraan gender terhadap pertumbuhan ekonomi antar negara dan antar jenis industri pada komposisi gender yang berbeda, didapatkan kesimpulan bahwa ketidaksetaraan gender memiliki *causal effect* terhadap capaian riil hasil ekonomi pada level industri. Semakin tinggi kesetaraan gender akan semakin tinggi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yakni dengan mengalokasikan tenaga kerja wanita pada sektor produktif.

Kangile *et al.* (2021) memberikan kesimpulan bahwa kesetaraan gender dapat meningkatkan daya saing dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesetaraan gender menyiratkan kesempatan, tanggung jawab, dan hak yang sama bagi laki-laki dan untuk meningkatkan pemerataan manfaat, sehingga berkontribusi pada kesetaraan gender serta peningkatan mata pencaharian. Peningkatan mata pencaharian menyiratkan peningkatan akses ke peluang ekonomi dan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan untuk hidup. Hal ini memiliki kontribusi langsung untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terkait kemiskinan, kelaparan, lapangan kerja, pelestarian lingkungan, dan kesetaraan gender (Glazebrook dan Opoku, 2020).

METODE

Penelitian ini membahas tentang kondisi Covid-19 dan ketimpangan gender serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Periode penelitian dimulai dari tahun 2015-2021 di 34 provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif deskriptif, di mana data yang diperoleh berupa angka, kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi ilmiah dibalik angka tersebut. Jenis data dalam penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari publikasi BPS. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu metode studi pustaka yang bersumber dari berbagai literatur jurnal nasional dan internasional, buku serta literatur ilmiah

lainnya. Kelengkapan data variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Variabel Penelitian

Variabel	Simbol	Definisi	Satuan
Variabel Dependen	<i>lnpdrb_k</i>	Pertumbuhan ekonomi (PDRB per kapita (log))	Juta Rupiah
Variabel Independen	<i>cov</i>	Dummy Covid-19	Sebelum Covid-19=0, Sesudah Covid-19=1
	<i>lnikg</i>	Indeks ketimpangan gender (log)	0-1
	<i>lnipg</i>	Indeks pembangunan gender (log)	0-100
	<i>lnidg</i>	Indeks pemberdayaan gender (log)	0-100
Variabel Kontrol	<i>lnipm</i>	Indeks pembangunan manusia (log)	0-100
	<i>lnpmtb</i>	Pembentukan modal tetap bruto (log)	Juta Rupiah
	<i>rulp</i>	Rasio upah laki-laki terhadap perempuan	Persen

Metode analisis yang digunakan yakni analisis deskriptif dan analisis regresi data panel dengan pengolahan data menggunakan aplikasi *Microsoft Excel*, dan *STATA 16*. Dalam penelitian ini, akan mendeskripsikan ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi di Indonesia sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Metode analisis data panel merupakan metode yang digunakan untuk analisis empiris dengan data yang lebih dinamis. Data panel merupakan data yang menggambarkan gabungan data *cross-section* dan *time-series* atau biasa juga dikenal *pooled data*. Model penelitian yang digunakan untuk menganalisis pengaruh Covid-19 dan ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengadaptasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Sari (2021) dengan menambahkan beberapa variabel yang secara umum memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan umumnya digunakan dalam persamaan pertumbuhan serta tambahan variabel

dummy Covid-19. Berikut merupakan model yang digunakan dalam penelitian ini.

$$\begin{aligned} \ln pdrb_{k_{it}} = & \beta_0 + \beta_1 cov_{it} + \beta_2 lnikg_{it} + \beta_3 cov_{it} \\ & * lnikg_{it} + \beta_4 lnipg_{it} + \beta_5 cov_{it} \\ & * lnipg_{it} + \beta_6 lnidg_{it} + \beta_7 cov_{it} \\ & * lnidg_{it} + \theta lnvk_{it} + \varepsilon_{it} \dots (1) \end{aligned}$$

Model ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah terjadinya pandemi Covid-19.

Sebelum Covid-19 (*cov* = 0)

$$\begin{aligned} \ln pdrb_{k_{it}} = & \beta_0 + \beta_1 cov_{it}(0) + \beta_2 lnikg_{it} \\ & + \beta_3 cov_{it}(0) * lnikg_{it} + \beta_4 lnipg_{it} \\ & + \beta_5 cov_{it}(0) * lnipg_{it} + \beta_6 lnidg_{it} \\ & + \beta_7 cov_{it}(0) * lnidg_{it} + \theta vk_{it} \\ & + \varepsilon_{it} \dots (2) \end{aligned}$$

$$\ln pdrb_{k_{it}} = \beta_0 + \beta_2 lnikg_{it} + \beta_4 lnipg_{it} + \beta_6 lnidg_{it} + \theta lnvk_{it} + \varepsilon_{it} \dots (3)$$

Sesudah Covid-19 (*cov* = 1)

$$\begin{aligned} \ln pdrb_{k_{it}} = & \beta_0 + \beta_1 cov_{it}(1) + \beta_2 lnikg_{it} \\ & + \beta_3 cov_{it}(1) * lnikg_{it} + \beta_4 lnipg_{it} \\ & + \beta_5 cov_{it}(1) * lnipg_{it} + \beta_6 lnidg_{it} \\ & + \beta_7 cov_{it}(1) * lnidg_{it} + \theta vk_{it} \\ & + \varepsilon_{it} \dots (4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ln pdrb_{k_{it}} = & (\beta_0 + \beta_1) + (\beta_2 + \beta_3) lnikg_{it} \\ & + (\beta_4 + \beta_5) lnipg_{it} \\ & + (\beta_6 + \beta_7) lnidg_{it} + \theta lnvk_{it} \\ & + \varepsilon_{it} \dots (5) \end{aligned}$$

Signifikansi β_1 menunjukkan ada tidaknya perbedaan pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Signifikansi β_3 menunjukkan ada tidaknya perbedaan pengaruh indeks ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Signifikansi β_5 menunjukkan ada tidaknya perbedaan pengaruh indeks pembangunan gender terhadap pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Signifikansi β_7 menunjukkan ada tidaknya perbedaan pengaruh indeks pemberdayaan gender terhadap pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah pandemi Covid-19.

PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Ketimpangan gender adalah perbedaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya

sebagai manusia untuk berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan gender yang terjadi dalam suatu wilayah maka digunakan IKG yang dapat menunjukkan ketidakefektifan pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan pencapaian pembangunan perempuan dan laki-laki. Indikator yang digunakan oleh IKG dikelompokkan dalam tiga dimensi, yaitu kesehatan, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Dimensi kesehatan hanya dihitung dari penduduk perempuan, indikator dalam dimensi ini adalah proporsi persalinan tidak di fasilitas kesehatan dan proporsi wanita berusia 15-49 tahun yang pernah kawin dan saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun. Dimensi pemberdayaan dihitung dari persentase penduduk laki-laki dan perempuan dengan pendidikan minimal SMA dan persentase laki-laki dan perempuan yang duduk di parlemen. Sementara dimensi pasar kerja dihitung dari TPAK. Nilai IKG adalah antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 mencerminkan kesetaraan gender yang sempurna, yang menghasilkan tingkat pencapaian pembangunan yang optimal. Nilai 1 mencerminkan kesenjangan gender yang sempurna, yang menyebabkan kerugian total dalam pencapaian pembangunan karena ketidaksetaraan gender (Nugroho dan Clarissa, 2022).

Tabel 2. menunjukkan IKG di Indonesia. Pada tahun 2019, sebelum pandemi Covid-19, ketimpangan gender telah membaik yang ditunjukkan oleh penurunan IKG di hampir semua provinsi. Wilayah dengan IKG tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 0,543, sedangkan wilayah dengan IKG terendah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,081. Perbandingan ketimpangan gender tersebut sebesar 6,70 kali lipat. Kemudian, rata-rata IKG seluruh provinsi adalah 0,423.

Saat pandemi berlangsung pada tahun 2020, banyak provinsi yang mengalami penurunan IKG. Daerah dengan IKG tertinggi masih Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun nilainya turun dari tahun sebelumnya menjadi 0,531. Sementara itu, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga masih menjadi daerah dengan

IKG terendah dengan nilai 0,069. Rata-rata IKG pada masa pandemi turun dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 0,407. Kemudian, selisih antara IKG tertinggi dan terendah terlihat meningkat menjadi 7,70 kali lipat. Wilayah dengan IKG paling terdampak pandemi adalah Provinsi Bali dengan rasio 139,36 persen, yang mengalami peningkatan IKG yang sangat drastis. Sementara itu, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi wilayah dengan IKG paling tidak terdampak pandemi yang ditunjukkan dengan penurunan IKG dengan nilai rasio sebesar 14,81 persen.

Setelah pelaksanaan program PEN, dapat dilihat bahwa disparitas kesetaraan gender antar provinsi mengalami penurunan, yang berarti terdapat perbaikan menuju kesetaraan. Daerah dengan IKG tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0,506, sedangkan daerah dengan IKG terendah adalah Provinsi Bali sebesar 0,076. Rata-rata IKG pada tahun tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 0,393, rasio IKG tertinggi dan terendah sebesar 6,66 kali lipat. Daerah Istimewa Yogyakarta sebelumnya merupakan daerah dengan IKG terendah yang terdampak pandemi, namun setelah penerapan kebijakan PEN, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah yang mengalami peningkatan IKG tertinggi dengan rasio sebesar 140,58 persen. Selanjutnya, daerah yang mengalami pemulihan IKG setelah penerapan kebijakan adalah Provinsi Bali yang sebelumnya juga merupakan daerah dengan IKG paling terdampak pandemi, namun setelah penerapan kebijakan PEN mengalami penurunan dengan selisih penurunan IKG sebesar 66,22 persen.

Tabel 2. Perkembangan IKG Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 di Indonesia

Provinsi	IKG (0-1)				
	2019	2020	2021	%Δ2020	%Δ2021
AC	0,438	0,417	0,398	-4,79	-4,56
SU	0,432	0,410	0,385	-5,09	-6,10
SB	0,429	0,390	0,352	-9,09	-9,74
RI	0,472	0,447	0,419	-5,30	-6,26
JA	0,525	0,505	0,496	-3,81	-1,78
SS	0,457	0,433	0,433	-5,25	0,00
BE	0,495	0,459	0,457	-7,27	-0,44
LA	0,425	0,403	0,380	-5,18	-5,71
BB	0,497	0,439	0,406	-11,67	-7,52
KR	0,351	0,334	0,308	-4,84	-7,78
JK	0,186	0,166	0,151	-10,75	-9,04

Provinsi	IKG (0-1)				
	2019	2020	2021	% Δ 2020	% Δ 2021
JB	0,447	0,427	0,435	-4,47	1,87
JT	0,267	0,256	0,269	-4,12	5,08
YO	0,081	0,069	0,166	-14,81	140,58
JI	0,349	0,318	0,316	-8,88	-0,63
BT	0,452	0,431	0,421	-4,65	-2,32
BA	0,094	0,225	0,076	139,36	-66,22
NB	0,543	0,531	0,490	-2,21	-7,72
NT	0,430	0,416	0,376	-3,26	-9,62
KB	0,509	0,498	0,483	-2,16	-3,01
KT	0,494	0,494	0,482	0,00	-2,43
KS	0,469	0,451	0,438	-3,84	-2,88
KI	0,420	0,405	0,378	-3,57	-6,67
KU	0,447	0,417	0,416	-6,71	-0,24
SA	0,392	0,374	0,380	-4,59	1,60
ST	0,460	0,459	0,437	-0,22	-4,79
SN	0,402	0,354	0,319	-11,94	-9,89
SG	0,520	0,510	0,506	-1,92	-0,78
GO	0,391	0,390	0,386	-0,26	-1,03
SR	0,506	0,486	0,482	-3,95	-0,82
MA	0,502	0,487	0,473	-2,99	-2,87
MU	0,495	0,493	0,485	-0,40	-1,62
PB	0,495	0,477	0,479	-3,64	0,42
PA	0,506	0,478	0,480	-5,53	0,42
Minimum	0,081	0,069	0,076	-14,81	-66,22
Maksimum	0,543	0,531	0,506	139,36	140,58
Rasio	6,704	7,696	6,658		
Rata-rata	0,423	0,407	0,393		

Sumber: BPS Indonesia, 2019-2021 (diolah)

Penurunan ketimpangan gender idealnya diikuti dengan peningkatan pembangunan gender dan pemberdayaan gender. Hubungan antara Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) idealnya berlawanan. Semakin tinggi IPG dan IDG seharusnya didukung oleh semakin rendahnya IKG dan sebaliknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di daerah yang pembangunan manusianya baik, cenderung memiliki kesempatan akses yang sama dalam hal pendidikan, kesehatan, politik, dan ketenagakerjaan bagi laki-laki dan perempuan. IPG merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk yang meliputi angka harapan hidup (AHH), angka harapan lama sekolah (AHL), rata-rata lama sekolah (RLS), dan pengeluaran per kapita untuk mengukur akses terhadap sumber daya dalam mencapai standar hidup layak. Sedangkan IDG menunjukkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan politik, indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender di bidang politik

melalui keterlibatan perempuan di parlemen, pengambilan keputusan yang dilihat dari posisi dan kedudukannya sebagai tenaga profesional dan ekonomi yang diukur melalui kontribusi pendapatan perempuan. IPG dan IDG memiliki rentang nilai 1 sampai 100. Semakin mendekati nilai 100, maka semakin rendah tingkat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan (Kertati, 2021).

Tabel 3. menunjukkan perkembangan IPG dan IDG di Indonesia. Pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19, wilayah dengan IPG tertinggi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai IPG sebesar 94,77. Sementara itu, wilayah dengan IPG terendah adalah Provinsi Papua dengan nilai IPG sebesar 80,05. Kemudian, rata-rata IPG seluruh provinsi sebesar 90,28 dengan rasio IPG tertinggi dan terendah sebesar 1,18 kali lipat.

Selama masa pandemi 2020, beberapa daerah mengalami peningkatan IPG, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih menjadi daerah dengan nilai IPG tertinggi selama masa pandemi yaitu sebesar 94,80, lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan sebelum pandemi. Sementara itu, daerah dengan IPG terendah masih ditempati oleh Provinsi Papua dengan nilai 79,59. Rata-rata IPG secara keseluruhan pada tahun tersebut adalah 90,23 dengan rasio IPG tertinggi dan terendah sebesar 1,19 kali lipat. Wilayah dengan IPG paling terdampak pandemi, yaitu Provinsi Papua dengan nilai rasio sebesar 0,57 persen, di mana wilayah tersebut mengalami penurunan IPG yang sangat drastis. Sementara itu, Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan IPG yang paling sedikit terdampak pandemi, yang ditunjukkan dengan peningkatan IPG dengan nilai rasio sebesar 0,32 persen.

Selanjutnya, dengan pelaksanaan program PEN, pemulihan nilai IPG mengalami peningkatan yang cukup baik, IPG dengan kategori nilai tertinggi berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 94,88, sedangkan daerah dengan nilai IPG terendah sesudah pandemi masih ditempati oleh Provinsi Papua dengan nilai IPG 80,16. Rata-rata nilai IPG nasional adalah 90,41 dengan rasio 1,18 kali lipat. Perbandingan sebelum dan sesudah pandemi menunjukkan bahwa masih ada empat provinsi yang mengalami penurunan IPG, antara

lain Provinsi Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Selama tiga tahun terakhir, sebagian besar nilai IDG cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019 sebelum pandemi, wilayah dengan nilai IDG tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai 83,20. Sementara itu, nilai IDG terendah berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai 51,91. Selanjutnya, rata-rata IDG nasional sebesar 69,23 dengan rasio IDG tertinggi dan terendah sebesar 1,60 kali lipat.

Kemudian setelah pandemi pada tahun 2020, sebagian besar nilai IDG di hampir seluruh provinsi mengalami penurunan, Provinsi Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan IDG tertinggi yaitu 75,43 dan Provinsi Bangka Belitung menjadi provinsi dengan IDG terendah yaitu 47,37. Rasio IDG tertinggi dan terendah adalah 1,59 kali lipat dengan rata-rata IDG nasional sebesar 62,31 lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Selama masa pandemi, hanya beberapa provinsi yang mempertahankan nilai

IDG dan mengalami peningkatan, untuk wilayah dengan penurunan IDG tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera Selatan dengan rasio penurunan sebesar 29,79 persen. Sementara itu, wilayah dengan peningkatan IDG tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Utara dengan rasio peningkatan sebesar 12,30 persen.

Penerapan kebijakan PEN pada masa pandemi telah membantu meningkatkan IDG di beberapa provinsi, namun terlihat masih cukup banyak daerah yang mengalami penurunan nilai IDG. Kategori nilai IDG tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai 75,66, sedangkan daerah dengan nilai IDG terendah setelah pandemi masih ditempati oleh Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai IDG sebesar 47,84. Rata-rata nilai IDG nasional adalah 62,26 dengan rasio 1,58 kali. Wilayah dengan peningkatan IDG terbaik adalah Provinsi Sulawesi Selatan dengan rasio 2,70 persen, disusul beberapa provinsi lainnya. Sementara itu, wilayah dengan penurunan IDG tertinggi masih berada di Provinsi Sumatera Selatan dengan rasio 8,48 persen.

Tabel 3. Perkembangan IPG dan IDG Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 Di Indonesia

Provinsi	IPG (1-100)					IDG (1-100)				
	2019	2020	2021	% Δ 2020	% Δ 2021	2019	2020	2021	% Δ 2020	% Δ 2021
AC	91,84	92,07	92,23	0,25	0,17	63,31	63,47	63,24	0,25	-0,36
SU	90,71	90,67	90,73	-0,04	0,07	67,76	64,65	64,95	-4,59	0,46
SB	94,09	94,17	94,34	0,09	0,18	59,09	59,83	59,65	1,25	-0,30
RI	88,43	88,14	88,38	-0,33	0,27	69,17	56,41	55,87	-18,45	-0,96
JA	88,44	88,41	88,62	-0,03	0,24	65,97	58,83	58,10	-10,82	-1,24
SS	92,40	92,38	92,35	-0,02	-0,03	74,45	52,27	47,84	-29,79	-8,48
BE	91,19	91,00	91,16	-0,21	0,18	69,78	71,39	71,82	2,31	0,60
LA	90,39	90,33	90,37	-0,07	0,04	69,23	57,22	56,69	-17,35	-0,93
BB	89,00	88,92	89,11	-0,09	0,21	52,96	47,37	48,11	-10,56	1,56
KR	93,10	93,31	93,49	0,23	0,19	61,59	65,69	66,02	6,66	0,50
JK	94,71	94,63	94,84	-0,08	0,22	75,14	57,98	58,17	-22,84	0,33
JB	89,26	89,20	89,36	-0,07	0,18	69,48	52,00	51,27	-25,16	-1,40
JT	91,89	92,18	92,48	0,32	0,33	72,18	52,60	52,30	-27,13	-0,57
YO	94,77	94,80	94,88	0,03	0,08	73,59	56,49	56,76	-23,24	0,48
JI	90,91	91,07	91,67	0,18	0,66	73,04	73,50	75,01	0,63	2,05
BT	91,67	91,74	91,83	0,08	0,10	68,83	61,56	61,74	-10,56	0,29
BA	93,72	93,79	94,01	0,07	0,23	72,27	58,27	58,42	-19,37	0,26
NB	90,40	90,45	90,53	0,06	0,09	51,91	52,58	52,53	1,29	-0,10
NT	92,72	92,73	92,63	0,01	-0,11	73,37	55,32	55,04	-24,60	-0,51
KB	86,81	86,87	86,95	0,07	0,09	68,07	63,59	62,42	-6,58	-1,84
KT	89,09	89,03	88,79	-0,07	-0,27	83,20	75,43	75,66	-9,34	0,30
KS	88,61	88,86	88,86	0,28	0,00	74,60	65,34	65,47	-12,41	0,20
KI	85,98	85,70	85,95	-0,33	0,29	65,65	57,93	58,26	-11,76	0,57
KU	87,00	86,67	87,30	-0,38	0,73	61,48	69,04	68,91	12,30	-0,19
SA	94,53	94,42	94,61	-0,12	0,20	79,10	67,52	67,79	-14,64	0,40
ST	92,01	91,87	91,91	-0,15	0,04	74,49	62,03	60,33	-16,73	-2,74
SN	93,09	92,86	92,85	-0,25	-0,01	76,01	70,01	71,90	-7,89	2,70
SG	90,56	90,50	90,68	-0,07	0,20	71,40	69,61	69,25	-2,51	-0,52

Provinsi	IPG (1-100)					IDG (1-100)				
	2019	2020	2021	%Δ2020	%Δ2021	2019	2020	2021	%Δ2020	%Δ2021
GO	86,83	86,73	87,50	-0,12	0,89	70,67	74,05	74,39	4,78	0,46
SR	89,76	89,43	89,57	-0,37	0,16	65,92	65,84	66,36	-0,12	0,79
MA	93,04	92,97	93,19	-0,08	0,24	75,77	60,07	59,51	-20,72	-0,93
MU	89,61	89,55	89,75	-0,07	0,22	77,50	71,52	71,96	-7,72	0,62
PB	82,74	82,91	83,00	0,21	0,11	61,52	67,48	68,54	9,69	1,57
PA	80,05	79,59	80,16	-0,57	0,72	65,37	61,49	62,40	-5,94	1,48
Minimum	80,05	79,59	80,16	-0,57	-0,27	51,91	47,37	47,84	-29,79	-8,48
Maksimum	94,77	94,80	94,88	0,32	0,89	83,20	75,43	75,66	12,30	2,70
Rasio	1,18	1,19	1,18			1,60	1,59	1,58		
Rata-rata	90,28	90,23	90,41			69,23	62,31	62,26		

Sumber: BPS Indonesia, 2019-2021 (diolah)

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi, karena dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan meningkatkan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tabel 4. menunjukkan PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19, wilayah dengan PDRB per kapita tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 174,81 juta. Sementara itu, wilayah dengan PDRB per kapita terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai 12,76 juta. Rata-rata PDRB per kapita nasional adalah 43,64 juta dengan rasio PDRB per kapita tertinggi dan terendah sebesar 13,70 kali lipat.

Pada masa pandemi tahun 2020, hampir semua provinsi mengalami penurunan PDRB per kapita, Provinsi DKI Jakarta masih menjadi daerah dengan PDRB per kapita tertinggi, yaitu senilai 170,09 juta. Sementara itu, daerah dengan PDRB per kapita terendah juga masih berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai 12,96 juta. Rasio PDRB per kapita tertinggi dan terendah mencapai 13,12 kali lipat dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi sebesar 42,50 juta. Selama masa pandemi, wilayah dengan PDRB per kapita yang paling terdampak oleh pandemi berada di Provinsi Papua dengan rasio penurunan sebesar -20,13 persen. Sementara itu, daerah dengan peningkatan PDRB per kapita terdampak pandemi paling kecil adalah Provinsi Sulawesi Tengah dengan rasio peningkatan sebesar 7,13 persen.

Kemudian setelah program PEN dilaksanakan, terlihat bahwa PDRB per kapita mulai membaik dan mengalami peningkatan di

hampir semua provinsi setiap tahunnya. Setelah pandemi, daerah dengan PDRB per kapita tertinggi masih diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 174,94 juta, sedangkan daerah dengan PDRB per kapita terendah juga masih diduduki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai 13,09 juta. Rata-rata PDRB per kapita nasional sebesar 43,56 juta, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kemudian, untuk perbandingan PDRB per kapita setelah pemulihan ekonomi, Provinsi Maluku Utara menjadi daerah dengan rasio kenaikan PDRB per kapita tertinggi, yakni mencapai 14,99 persen. Dengan demikian, Maluku Utara berhasil mencapai keberhasilan dalam pemulihan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan kebijakan utama, karena banyak ukuran masalah sosial dan kemiskinan dapat diatasi dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan salah satu syarat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 8,83 persen, sedangkan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Papua sebesar -15,74 persen. Kemudian, rata-rata pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi adalah sebesar 4,68 persen. Rasio pertumbuhan ekonomi tertinggi dan terendah sebesar -0,56 kali lipat.

Pada masa pandemi, Provinsi Maluku Utara memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 5,39 persen, sedangkan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Provinsi Bali sebesar -9,34 persen. Kemudian, rasio perbandingan pertumbuhan ekonomi tertinggi dan terendah mencapai -0,58 kali lipat dengan

rata-rata -1,24 persen. Dengan demikian, Provinsi Bali menjadi daerah yang terdampak cukup parah akibat pandemi.

Setelah program PEN dilaksanakan, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat di beberapa daerah. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi masih ditempati oleh Provinsi Maluku Utara dengan nilai 16,79 persen. Sementara itu, daerah dengan pertumbuhan ekonomi terendah masih

ditempati oleh Provinsi Bali dengan nilai -2,46 persen. Rasio antara pertumbuhan ekonomi tertinggi dan terendah secara keseluruhan adalah sebesar -6,83 kali lipat. Kebijakan PEN yang diterapkan dapat dikatakan berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi. Wilayah dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi terbaik adalah Provinsi Papua dengan rasio sebesar 12,77 persen yang diikuti oleh beberapa provinsi lainnya.

Tabel 4. Perkembangan PDRB per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 di Indonesia

Provinsi	PDRB per kapita (juta rupiah)					Pertumbuhan Ekonomi (persen)				
	2019	2020	2021	% Δ 2020	% Δ 2021	2019	2020	2021	Δ 2020	Δ 2021
AC	24,84	25,02	25,36	0,71	1,36	4,14	-0,37	2,79	-4,51	3,16
SU	36,85	36,18	36,67	-1,84	1,36	5,22	-1,07	2,61	-6,29	3,68
SB	31,43	30,70	31,36	-2,33	2,17	5,01	-1,61	3,29	-6,62	4,90
RI	72,51	76,88	78,00	6,03	1,44	2,81	-1,13	3,36	-3,94	4,49
JA	41,81	41,93	42,91	0,27	2,34	4,35	-0,51	3,69	-4,86	4,20
SS	37,13	37,32	38,17	0,53	2,28	5,69	-0,11	3,58	-5,80	3,69
BE	23,50	23,11	23,54	-1,70	1,88	4,94	-0,02	3,27	-4,96	3,29
LA	28,89	26,75	27,19	-7,43	1,67	5,26	-1,66	2,77	-6,92	4,43
BB	37,17	36,31	37,59	-2,33	3,52	3,32	-2,29	5,05	-5,61	7,34
KR	81,14	85,01	85,43	4,77	0,49	4,83	-3,80	3,43	-8,63	7,23
JK	174,81	170,09	174,94	-2,70	2,85	5,82	-2,39	3,56	-8,21	5,95
JB	30,41	30,18	30,91	-0,77	2,41	5,02	-2,52	3,74	-7,54	6,26
JT	28,70	26,48	27,14	-7,71	2,49	5,36	-2,65	3,33	-8,01	5,98
YO	27,01	27,75	28,92	2,76	4,20	6,59	-2,67	5,58	-9,26	8,25
JI	41,51	39,69	40,82	-4,40	2,86	5,53	-2,33	3,56	-7,86	5,89
BT	35,91	37,17	38,22	3,48	2,83	5,26	-3,39	4,49	-8,65	7,88
BA	37,30	34,22	32,98	-8,26	-3,63	5,60	-9,34	-2,46	-14,94	6,88
NB	18,22	17,58	17,71	-3,49	0,70	3,90	-0,62	2,30	-4,52	2,92
NT	12,76	12,96	13,09	1,56	1,02	5,25	-0,84	2,52	-6,09	3,36
KB	27,20	24,95	25,81	-8,26	3,44	5,09	-1,82	4,80	-6,91	6,62
KT	37,87	37,15	37,86	-1,91	1,91	6,12	-1,41	3,59	-7,53	5,00
KS	31,61	32,21	32,85	1,90	1,98	4,09	-1,82	3,48	-5,91	5,30
KI	134,41	125,76	127,21	-6,43	1,15	4,70	-2,90	2,55	-7,60	5,45
KU	88,30	86,82	88,51	-1,67	1,94	6,89	-1,09	3,98	-7,98	5,07
SA	35,69	33,67	34,79	-5,65	3,32	5,65	-0,99	4,16	-6,64	5,15
ST	42,05	45,05	49,59	7,13	10,07	8,83	4,86	11,70	-3,97	6,84
SN	37,47	36,25	37,57	-3,28	3,66	6,91	-0,71	4,64	-7,62	5,35
SG	35,31	35,71	36,58	1,13	2,44	6,50	-0,65	4,10	-7,15	4,75
GO	24,17	24,31	24,65	0,60	1,38	6,40	-0,02	2,41	-6,42	2,43
SR	24,16	22,67	22,90	-6,20	1,01	5,56	-2,34	2,57	-7,90	4,91
MA	17,56	16,69	17,02	-4,95	1,99	5,41	-0,91	3,05	-6,32	3,96
MU	21,52	21,92	25,20	1,81	14,99	6,25	5,39	16,79	-0,86	11,40
PB	64,42	54,49	52,98	-15,42	-2,77	2,66	-0,76	-0,51	-3,42	0,25
PA	40,20	32,11	36,43	-20,13	13,46	-15,74	2,39	15,16	18,13	12,77
Minimum	12,76	12,96	13,09	-20,13	-3,63	-15,74	-9,34	-2,46	-14,94	0,25
Maksimum	174,81	170,09	174,94	7,13	14,99	8,83	5,39	16,79	18,13	12,77
Rasio	13,70	13,12	13,36			-0,56	-0,58	-6,83		
Rata-rata	43,64	42,50	43,56			4,68	-1,24	4,20		

Sumber: BPS Indonesia, 2019-2021 (diolah)

Analisis Regresi Data Panel

Dalam analisis regresi data panel, terdapat tiga uji yang perlu dilakukan untuk mengetahui

dan menentukan teknik pemilihan pendekatan model yang terbaik yang akan digunakan dalam penelitian. Ketiga uji tersebut adalah uji Chow

yang digunakan untuk menentukan model terbaik antara CEM atau FEM. Ketika hasil probabilitas dari uji Chow lebih kecil dari taraf nyata, maka keputusan yang diambil adalah menggunakan model FEM. Selanjutnya, uji Hausman yang digunakan untuk memilih model FEM atau REM dilihat dari nilai *Chi-square*. Jika probabilitas kurang dari taraf nyata, maka model yang digunakan adalah FEM, dan sebaliknya jika probabilitas lebih dari taraf nyata, maka model yang akan dipilih adalah REM. Terakhir, uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk menentukan model terbaik antara REM dan CEM. Jika hasil perhitungan LM lebih besar dari *Chi-square* tabel, maka model yang digunakan adalah CEM, dan sebaliknya (Agusalim *et al.*, 2022).

Hasil analisis model penelitian yang terpilih menggunakan regresi data panel dengan teknik FEM. Berdasarkan Tabel 5. terlihat bahwa interpretasi untuk *R-squared* atau koefisien determinasi model penelitian sebesar 0,693 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang terpilih secara bersama-sama mampu menjelaskan keragaman pertumbuhan ekonomi sebesar 69,3 persen dan sisanya sebesar 30,7 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi. Kemudian hasil dari *F-statistic* adalah sebesar 374,11 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000, nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variabel Independen	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi (<i>lnpdrb_k</i>)
<i>cov</i>	-7,798*** (1,009)
<i>lnikg</i>	-0,052* (0,029)
<i>cov * lnikg</i>	0,038* (0,021)
<i>lnipg</i>	-0,677 (1,142)
<i>cov * lnipg</i>	1,598*** (0,217)
<i>lnidg</i>	-0,079 (0,064)
<i>cov * lnidg</i>	0,108 (0,072)
Variabel Kontrol	
<i>lnipm</i>	2,037*** (0,389)
<i>lnpmtb</i>	0,263*** (0,039)
<i>rulp</i>	0,035 (0,043)
Konstanta	-2,592 (4,808)
<i>R-squared</i>	0,693
<i>F-statistic</i>	374,11
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,0000

Variabel Independen	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi (<i>lnpdrb_k</i>)
Jumlah observasi	238
Jumlah provinsi	34
Kriteria Pemilihan Model	
• Uji Chow	0,0000
• Uji Hausman	0,0014
• Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	0,0000
Keputusan	FEM

Catatan: Dalam kurung adalah standar error; signifikansi taraf nyata *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$
 Sumber: Hasil kalkulasi penulis (2023)

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor dilakukannya penelitian ini. Peneliti mencoba untuk menganalisis beberapa variabel yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Dapat dilihat pada Tabel 6. yang menunjukkan hasil estimasi periode sebelum dan sesudah pandemi, terdapat lima variabel yang signifikan pada kategori sebelum dan sesudah pandemi. Variabel yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi antara lain variabel Covid-19, IKG, IPG, dan variabel kontrol lainnya seperti IPM dan PMTB. Sementara itu, variabel IDG dan RULP tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik sebelum maupun sesudah pandemi.

Tabel 6. Hasil Estimasi Periode Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19

Variabel Independen	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi (<i>lnpdrb_k</i>)	
	Sebelum Covid-19 (<i>cov = 0</i>)	Sesudah Covid-19 (<i>cov = 1</i>)
<i>cov</i>	-	-7,798
<i>lnikg</i>	-0,052	-0,014
<i>lnipg</i>	-	1,598
<i>lnidg</i>	-	-
Variabel Kontrol		
<i>lnipm</i>	-	2,037
<i>lnpmtb</i>	-	0,263
<i>rulp</i>	-	-

Sumber: Hasil kalkulasi penulis (2023)

Pengaruh Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan analisis regresi data panel, Covid-19 tercatat sebagai variabel yang paling memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Secara parsial, hasil uji regresi variabel *dummy* Covid-19 memiliki hubungan yang negatif dan

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Hasil estimasi yang diperoleh adalah sebesar -7,80. Angka ini berarti bahwa ketika terjadi pandemi, pertumbuhan ekonomi menurun sebesar 7,80 persen dari kondisi awal sebelum pandemi.

Hasil estimasi sejalan dengan penelitian Iriyadi dan Purba (2022) yang menyatakan bahwa pandemi Covid-19 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap konsumsi masyarakat, investasi, ekspor dan impor. Faktor relaksasi berpengaruh positif terhadap konsumsi masyarakat, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto, namun belum berhasil menciptakan pertumbuhan investasi yang positif. Kebijakan pemerintah berusaha untuk memperkuat daya beli masyarakat, serta sektor produksi. Hal ini berdampak pada peningkatan konsumsi masyarakat dan menjadi faktor dominan dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi di masa pandemi. Dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada kontraksi pertumbuhan ekonomi dan juga penurunan pendapatan per kapita.

Pandemi Covid-19 telah melanda hampir seluruh negara di dunia, banyak negara yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sejak munculnya pandemi, termasuk Indonesia. Salah satu strategi kebijakan pemerintah dalam menyelamatkan kesehatan dan perekonomian nasional adalah dengan meluncurkan program PEN yang dirancang untuk melindungi, menjaga, dan meningkatkan kemampuan ekonomi dunia usaha dalam menjalankan usahanya di masa pandemi Covid-19. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin agar tidak semakin terpuruk. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi krusial dalam memastikan perekonomian Indonesia dapat bertahan dari dampak buruk pandemi Covid-19. APBN 2021 merupakan instrumen dalam PEN dan tonggak untuk menyeimbangkan berbagai tujuan. Tujuan tersebut adalah mendukung kelanjutan penanganan pandemi, mendorong pemulihan ekonomi, dan konsolidasi fiskal. Langkah-

langkah dan strategi percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi dalam APBN 2021 difokuskan pada aspek kesehatan, ekonomi, dan reformasi. Aspek kesehatan diarahkan pada penanganan Covid-19 dan pemulihan kesehatan masyarakat melalui penyediaan vaksin untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Aspek ekonomi diarahkan untuk memberikan kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif melalui dukungan terhadap program atau kegiatan di sektor-sektor terdampak, perluasan akses permodalan UMKM melalui subsidi bunga KUR, dan melanjutkan program perlindungan sosial yang dilakukan secara tepat sasaran dan terukur. Sementara itu, aspek reformasi diarahkan untuk memperkuat reformasi struktural untuk membangun fondasi yang kuat bagi pemulihan ekonomi dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*). Kebijakan ini berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tidak semakin menurun (Lativa, 2021).

Pengaruh Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Secara parsial, hasil uji regresi variabel IKG sebelum pandemi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa IKG menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebelum pandemi. Hasil estimasi yang diperoleh adalah sebesar -0,05. Angka ini berarti bahwa ketika IKG meningkat sebesar satu persen, maka akan diikuti oleh penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,05 persen. Selanjutnya, terdapat hasil uji regresi untuk variabel interaksi antara Covid-19 dengan variabel IKG yang juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa IKG menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sesudah pandemi. Hasil estimasi yang diperoleh adalah sebesar -0,01. Angka ini berarti bahwa ketika IKG meningkat sebesar satu persen, maka akan diikuti dengan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,01 persen. Hasil ini tidak memiliki perbedaan pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah pandemi Covid-19.

Hasil regresi yang dilakukan sebelum dan sesudah pandemi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi *et al.* (2021) yang mengungkapkan bahwa ketimpangan gender berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, peningkatan ketimpangan gender akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Handayani (2023) menjelaskan bahwa kondisi ketimpangan gender yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia disebabkan oleh kontribusi dari dimensi kesehatan, terutama angka kematian ibu yang masih tinggi. Dari dimensi ekonomi, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja juga lebih kecil dibandingkan laki-laki, serta partisipasi perempuan di bidang politik juga relatif rendah. Permasalahan kesetaraan gender lainnya di tingkat nasional adalah disparitas pencapaian indeks kesetaraan gender antar provinsi. Mengingat persoalan mendasar kesenjangan gender berasal dari akar budaya, maka strategi yang harus dilakukan adalah melalui internalisasi nilai-nilai kesetaraan, tidak hanya di tingkat negara, birokrasi, tetapi juga di tingkat lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat secara lebih proaktif.

Pengaruh Indeks Pembangunan Gender (IPG) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Secara parsial, hasil uji regresi variabel IPG tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa IPG tidak menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan atau kenaikan sebelum pandemi.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Lusiarista dan Arif (2022) yang menunjukkan bahwa naik turunnya IPG tidak menyebabkan perubahan pada pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan di mana dalam budaya tersebut perempuan lebih diarahkan untuk menjalankan peran di domestik daripada peran publik yang mengakibatkan diskriminasi dan ketidaksetaraan gender terhadap perempuan sering terjadi sehingga akses dan perannya di berbagai sektor menjadi terhambat, termasuk di sektor ekonomi. Pemerintah dapat memfasilitasi perempuan untuk berkontribusi dalam

pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, sehingga akan mengurangi ketimpangan gender.

Selanjutnya, terdapat hasil uji regresi untuk variabel interaksi antara Covid-19 dengan variabel IPG yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi setelah pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa IPG menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pandemi. Hasil estimasi yang diperoleh adalah sebesar 1,60. Angka tersebut dapat diinterpretasikan, ketika IPG meningkat sebesar satu persen, maka akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,60 persen. Hasil tersebut memiliki perbedaan pengaruh IPG terhadap pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah pandemi Covid-19.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Sari (2021), Syahrul dan Nursini (2022), dan Sitorus (2016) yang sebelumnya telah membuktikan bahwa IPG berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pembangunan gender di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya didorong oleh keberhasilan meningkatkan kemampuan dasar termasuk kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak pada laki-laki, tetapi juga penduduk perempuan. Semakin rendah ketimpangan gender dalam IPG, maka semakin maju pula kinerja ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini akan berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Saat pandemi terjadi, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diberlakukan, berbagai bentuk kegiatan sosialisasi atau penyuluhan mengenai kesetaraan gender cenderung dilakukan secara virtual. Khusus untuk perempuan pelaku usaha yang terdampak pandemi, KemenPPPA terus melakukan sosialisasi dan pendampingan, terutama bagi perempuan dari kelompok rentan. Dengan melakukan pelatihan kewirausahaan secara daring bekerja sama dengan kelompok masyarakat dan *start up* sebagai bekal agar mereka dapat beradaptasi menggunakan teknologi informasi sehingga dapat

meningkatkan kapasitas dan siap bersaing dalam situasi sulit di masa pandemi. Sesuai dengan arahan Presiden, di masa pandemi, prioritas diberikan pada peningkatan pemberdayaan perempuan di sektor usaha yang berperspektif gender, tidak untuk semua perempuan, tetapi secara khusus untuk perempuan yang termasuk dalam kategori rentan, seperti kepala keluarga, penyintas bencana, penyintas kekerasan, dan perempuan yang terpinggirkan. Dengan menyelenggarakan kegiatan pelatihan bagi perempuan di masa pandemi, diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan meningkatkan perekonomian negara (Kansil *et al.*, 2021).

Pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Secara parsial, hasil uji regresi variabel IDG dan variabel interaksi antara Covid-19 dengan variabel IDG tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa IDG tidak menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami kenaikan atau penurunan baik sebelum maupun sesudah pandemi.

Dalam penelitian ini, variabel IDG tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi. Selain itu, belum optimalnya peran perempuan di bidang politik dan ekonomi disebabkan karena bidang-bidang tersebut masih didominasi oleh laki-laki. Dominasi ini menyebabkan perempuan kurang memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dan tingkat produktivitasnya pun terbatas sehingga tidak optimal dalam memengaruhi perekonomian.

Bertolak belakang dengan penelitian Infarizki *et al.* (2020) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa peran perempuan dalam bidang ekonomi dan politik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, artinya IDG berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa jumlah profesional perempuan dan partisipasi perempuan dapat disetarakan dengan laki-laki. Hal ini berarti tidak ada

dominasi antara laki-laki dan perempuan, sehingga peran pemberdayaan perempuan dapat memengaruhi perekonomian dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Secara parsial, hasil uji regresi variabel IPM mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sesudah pandemi. Hal tersebut menunjukkan bahwa IPM menyebabkan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat di Indonesia. Hasil estimasi yang diperoleh adalah sebesar 2,04. Angka tersebut dapat diartikan, ketika IPM meningkat sebesar satu persen, maka akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,04 persen.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Agusalim *et al.*, (2022), Sari (2021), Nazmi dan Jamal (2018), dan Sitorus (2016). Beberapa penelitian tersebut membuktikan bahwa variabel IPM dapat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pembangunan manusia memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi modern karena pembangunan manusia yang baik akan membuat faktor-faktor produksi dapat dimaksimalkan. Penduduk yang berkualitas akan mampu berinovasi untuk mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada. Semakin cepat pembangunan manusia dengan pemerataan pendidikan dan kesehatan, maka pertumbuhan ekonomi akan mencapai peningkatan produktivitas dan kesempatan kerja.

Pengaruh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Secara parsial, hasil uji regresi variabel PMTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi setelah pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa PMTB menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat. Hasil estimasi yang diperoleh adalah sebesar 0,26. Angka tersebut dapat diartikan, ketika PMTB meningkat sebesar satu persen, maka akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,26 persen.

Hal yang sama juga ditemukan pada penelitian Fauziyah dan Juliprijanto (2022) dan Kesuma dan Astuti (2020). Pada beberapa penelitian tersebut dijelaskan bahwa PMTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pada sektor infrastruktur terhadap perekonomian di Indonesia.

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan per kapita. Pertumbuhan inklusif merupakan bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan seperti yang tertuang dalam kesepakatan global tentang SDGs, yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan pemerataan, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jaminan keberlanjutan pembangunan infrastruktur adalah tersedianya modal pembangunan yang cukup. Modal pembangunan infrastruktur dapat disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Investasi oleh pemerintah pusat ke daerah dilakukan melalui Alokasi Dana Khusus (DAK), sedangkan investasi yang dilakukan oleh pihak swasta tercermin dari pembentukan modal tetap bruto (Panjaitan *et al.*, 2019). Kemudian PMTB juga memiliki respon yang cepat ketika terjadi guncangan ekonomi, terutama pada masa pandemi. Dalam hal ini, pengadaan, pembuatan, pembelian atau perbaikan barang modal akan meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi yang pada akhirnya meningkatkan nilai tambah dari suatu proses produksi yang sedang berjalan. Peningkatan kontribusi PMTB terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dari waktu ke waktu memang diharapkan. Hal ini dikarenakan peningkatan investasi akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dalam jangka panjang akan mengurangi pengangguran dan ketimpangan ekonomi (Siregar dan Rizky, 2022).

Pengaruh Rasio Upah Laki-Laki terhadap Perempuan (RULP) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Secara parsial, hasil uji regresi variabel RULP tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa RULP tidak menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan baik sebelum maupun sesudah pandemi.

Variabel RULP merupakan bentuk rasio upah berdasarkan jenis kelamin dan upah berdasarkan upah minimum provinsi. Perbedaan upah antar gender merupakan salah satu masalah dalam perekonomian, banyak faktor yang memengaruhi kesenjangan upah antar gender, salah satunya karena modal kerja. Menurut Laili dan Damayanti (2018), adanya ekspektasi yang rendah terhadap perempuan dalam dunia kerja menjadi salah satu penyebabnya, memiliki tanggung jawab pekerjaan rumah tangga membuat modal manusia perempuan menjadi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hasil penelitian mereka juga membuktikan adanya diskriminasi upah antar gender akibat peningkatan produktivitas pekerja perempuan namun tidak diimbangi dengan peningkatan upah. Pada kenyataannya, meskipun selalu terjadi peningkatan upah buruh dari tahun ke tahun, namun upah yang diterima perempuan selalu lebih rendah dari laki-laki. Padahal sudah ada kebijakan anti diskriminasi upah antara laki-laki dan perempuan, yaitu Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 100. Dilansir dalam World Economic Forum pada tahun 2018, tercatat rata-rata pekerja perempuan di dunia masih dibayar 63 persen dari upah laki-laki (Sari, 2021). Selain itu, ketika perempuan mendapatkan upah yang setara dengan laki-laki, maka akan mengurangi tingkat kemiskinan perempuan. Hal ini berlaku jika seorang perempuan adalah seorang ibu tunggal yang menghidupi keluarganya. Dengan upah yang setara, keluarga akan merasa lebih aman secara ekonomi. Kesetaraan upah merupakan investasi jangka panjang bagi sebuah negara karena dengan kemampuan finansial yang baik, perempuan sebagai ibu akan lebih mampu memberikan kehidupan dan

pendidikan yang layak bagi anak-anaknya, yang di masa depan akan berpengaruh pada modal manusia (*human capital*). Peningkatan modal manusia generasi berikutnya inilah yang berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih besar (Ruiters dan Charteris, 2020).

Kebijakan Pembangunan Gender Dalam Pengurangan Kemiskinan

Ketimpangan gender merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia. Ketimpangan gender yang tinggi menjadi penghambat tercapainya pertumbuhan sosial, politik, dan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan tentunya menyebabkan kesejahteraan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Secara regulasi, pada dasarnya kebijakan publik di Indonesia terkait gender sudah ada sejak lama, bahkan sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Kemudian pada masa Orde Baru, dikeluarkan pula Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Selanjutnya pada era reformasi, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya INPRES tersebut adalah bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka dipandang perlu untuk melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Hingga saat ini, kebijakan serupa terkait kesetaraan gender masih terus dilakukan, yaitu dengan adanya komitmen global untuk mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan 2030 (Ridhwani dan Lestari, 2023).

Terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Peran perempuan dalam pembangunan tidak hanya

terbatas pada perempuan yang tinggal di perkotaan, namun kini peran perempuan yang tinggal di pedesaan juga turut andil dalam menentukan arah pembangunan desanya. Dengan adanya UU Desa, diharapkan dapat menjadi salah satu perwujudan hak-hak masyarakat desa dalam memajukan desanya dengan mengikutsertakan perempuan dalam pembangunan desa. Sehingga kesetaraan gender bagi perempuan di desa dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik dengan memberikan ruang dan kesempatan bagi perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan desa (Rahmawati, 2020).

Selain itu, dalam proses pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 merupakan komitmen pemerintah Indonesia sebagai anggota PBB untuk turut serta mewujudkan SDGs yang tertuang dalam *Transforming Our World: Agenda 2030* untuk Pembangunan Berkelanjutan. Salah satu tujuan SDGs yang dijabarkan dalam Lampiran Perpres Nomor 59 Tahun 2017 sebagai tujuan global dan selaras dengan pembangunan nasional Indonesia, adalah jaminan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kesetaraan gender merupakan hak asasi manusia yang fundamental yang akan mencegah perlakuan diskriminatif. Kesetaraan gender juga dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, memerangi kelaparan, kemiskinan, penanggulangan HIV/AIDS, yang akan diwujudkan dalam agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan. Perwujudan kesetaraan dan pemberdayaan gender merupakan wujud komitmen pemerintah bersama negara-negara anggota PBB untuk mencapai SDGs yang dimulai pada tahun 2017 (Prasetyawati, 2018).

Tujuan SDGs yang terkait dengan kesetaraan gender sejalan dengan tujuan KemenPPPA, yang berfokus pada peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. KemenPPPA memiliki beberapa kebijakan untuk mewujudkan tujuan tersebut yang tertuang dalam Peraturan KemenPPPA Nomor 2 Tahun 2020. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh KemenPPPA antara lain peningkatan peran dan partisipasi perempuan di

berbagai sektor pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan. Melalui kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan, KemenPPPA berkomitmen untuk memperkuat jejaring dan koordinasi untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, KemenPPPA juga berfokus pada perbaikan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data berbasis gender untuk merumuskan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut. Ketimpangan gender sebelum pandemi Covid-19 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, setelah pandemi ketimpangan gender juga mengalami penurunan namun penurunannya tidak terlalu banyak. Terdapat beberapa provinsi dengan ketimpangan terendah dan tertinggi sebelum dan sesudah pandemi. Sebelum dan sesudah pandemi, ketimpangan gender tertinggi berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Begitu juga dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi provinsi dengan ketimpangan gender terendah sebelum dan sesudah pandemi Covid-19.

Sebelum terjadinya Covid-19, pertumbuhan ekonomi yang diukur dari produk domestik regional bruto per kapita mengalami peningkatan namun tidak signifikan di beberapa wilayah provinsi di Indonesia. Namun, setelah terjadinya pandemi Covid-19 khususnya pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan namun cukup rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terdapat pula beberapa provinsi dengan nilai pertumbuhan ekonomi yang menonjol, antara lain Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Covid-19 berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, variabel IKG juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Selain itu, variabel indeks pembangunan gender IPG, IPM dan PMTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sesudah Covid-19. Ada pula variabel yang tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia baik sebelum dan sesudah Covid-19, diantaranya variabel IDG dan rasio upah laki-laki terhadap perempuan.

Ketimpangan gender menjadi penghambat tercapainya pertumbuhan sosial, politik, dan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*). Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan gender dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas keterlibatan dan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan tenaga kerja dan ekonomi yang akan membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan negara. Kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah seperti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan untuk mewujudkan terlaksananya kesetaraan gender dan peran serta perempuan dalam pembangunan desa, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 merupakan komitmen pemerintah Indonesia sebagai anggota PBB untuk turut serta mewujudkan SDGs, salah satu tujuan global SDGs yang selaras dengan pembangunan nasional Indonesia, adalah jaminan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta Peraturan KemenPPPA Nomor 2 Tahun 2020, adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh KemenPPPA antara lain peningkatan peran dan partisipasi perempuan di berbagai sektor pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan.

Untuk menurunkan ketimpangan gender dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, berdasarkan kesimpulan penelitian

sebelumnya, maka dapat diberikan beberapa saran, sebagai berikut: (1) Kepada berbagai pihak yang membaca penelitian ini, bahwa upaya menghilangkan ketimpangan gender dapat dimulai dari hal-hal sederhana di lingkungan sekitar, seperti menghilangkan stereotip gender di mana perempuan dianggap tidak membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, serta berbagai stereotip gender lainnya yang selama ini membatasi ruang gerak perempuan karena terbukti perempuan juga memiliki kontribusi dalam mendorong perekonomian. (2) Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan terkait masih adanya ketimpangan gender yang menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, agar dapat lebih mengintegrasikan isu gender dalam setiap program dan kegiatan. Diperlukan analisis data berbasis gender yang komprehensif (data terpilah) dari tingkat daerah terkecil hingga skala nasional agar kebijakan pemerintah terkait gender menjadi lebih terukur dan tepat sasaran. Kemudian diperlukan juga kebijakan tertulis dan resmi yang dapat menjamin terpenuhinya syarat-syarat utama dalam mendorong terciptanya pembangunan gender dan pemberdayaan gender di Indonesia. Untuk kebijakan yang sudah ada sebelumnya, implementasinya perlu ditingkatkan, mengingat isu kesetaraan gender merupakan isu kemanusiaan yang bersifat global dan berkaitan langsung dengan hak asasi manusia. (3) Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, indikator makro ekonomi harus ditingkatkan. Seperti memperbaiki infrastruktur dan memfasilitasi pemberdayaan perempuan dan angkatan kerja sehingga dapat menciptakan aktivitas ekonomi yang akan membantu meningkatkan pendapatan negara melalui peningkatan produktivitas agregat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendorong perekonomian negara. (4) Penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat melengkapi keterbatasan yang ada. Khusus untuk variabel pembangunan gender dan pemberdayaan gender, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan analisisnya dengan menggunakan berbagai

variabel, guna menyempurnakan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2021). Pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19: Analisis produktivitas tenaga kerja sektor pertanian. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 117–138.
<https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.292>.
- Adika, N. D., & Rahmawati, F. (2021). Analisis indikator ketimpangan gender dan relevansinya terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. *Ecoplan*, 4(2), 151-162.
<https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i2.400>.
- Aeni, N. (2021). Pandemi Covid-19: Dampak kesehatan, ekonomi, dan sosial. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, 17(1), 17-34.
<https://doi.org/10.33658/jl.v17i1.249>.
- Afif, N., Ubaidillah, A., & Sulhan, M. (2020). Konsep kesetaraan gender perspektif fatima mernissi dan implikasinya dalam pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 229-242.
<https://doi.org/10.37542/iq.v3i02.131>.
- Agusalim, L., Anggraeni, L., & Pasaribu, S. H. (2022). The Economy of Indonesia: Driven by Physical or Human Capital?. *JEJAK*, 15(1), 10-28.
- Aliyah, A. H. (2022). Menelaah relasi gender equality terhadap pertumbuhan ekonomi di jawa tengah. *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 4(2), 180-194.
<https://doi.org/10.32332/jsga.v4i02.5638>.
- Amory, J. D. S. (2019). Peranan gender perempuan dalam pembangunan di Sulawesi Barat tahun 2016-2018. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1-15.
- Arjani, N. L. (2021). Kesetaraan gender di bidang politik antara harapan dan realita. *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, 5(1), 1-6.
<https://doi.org/10.24843/SP.2021.v5.i01.p01>.
- Azwar, & Subekan, A. (2016). Analisis determinan kemiskinan di Sulawesi

- Selatan. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 2(1), 1-25.
<http://jurnal.bpk.go.id/index.php/TAKEN/article/view/36>.
- Bertay, A. C., Dordevic, L., & Sever C. (2020). Gender inequality and economic growth: Evidence from industry-level data. *IMF Working Papers*, 2020(119), 1-38.
<https://doi.org/10.5089/9781513546278.001>.
- Fauziyah & Juliprijanto, W. (2022). Pengaruh ketimpangan pendidikan antar gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 21(1), 71-78.
<https://doi.org/10.19184/ejeba.v7i2.17867>.
- Harahap, E. F., Luviana, L., & Huda, N. (2020). Tinjauan defisit fiskal, ekspor, impor dan jumlah umkm terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 151-161.
<https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.4907>.
- Hidayah, Z. M., & Rahmawati, F. (2020). Menelusur relasi indikator indeks pembangunan gender terhadap pertumbuhan ekonomi (Provinsi Jawa Timur). *EcceS: Economics Social and Development Studies*, 7(1), 110-129.
<https://doi.org/10.24252/ecc.v7i1.13919>.
- Infarizki, A. Y., Jalunggono, G., & Laut, L. T. (2020). Analisis pengaruh ketimpangan gender terhadap produk domestik regional bruto di Jawa Tengah tahun 2010-2018. *Dinamic*, 2(2), 528-547.
<https://dx.doi.org/10.31002/dinamic.v2i2.1387>.
- Iriyadi, I., & Purba, J. H. V. (2022). Pertumbuhan ekonomi Indonesia: Faktor pendorong pada pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 10(3), 529-544.
<https://doi.org/10.37641/jimkes.v10i3.1557>.
- Kangile, J. R., Kadigi, R. M. J., Mgeni, C. P., Munishi, B. P., Kashaigili, J., & Munishi, P. K. T. (2021). The role of coffee production and trade on gender equity and livelihood improvement in Tanzania. *Sustainability (Switzerland)*, 13(18), 1-14.
<https://doi.org/10.3390/su131810191>.
- Kansil, C. S., Prawira, M., & Martono, H. K. (2021). Pertahanan negara dan gender wanita di masa pandemi covid19 di Indonesia. *Prosiding Serina*, 1(1), 549-566.
<https://doi.org/10.24912/pserina.v1i1.17511>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak [KPPPA] & Badan Pusat Statistik [BPS]. (2016). *Pembangunan manusia berbasis gender 2016*. Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa.
- Kertati, I. (2021). Analisis indeks pembangunan gender (ipg) dan indeks pemberdayaan gender (idg) kota Surakarta. *Public Service and Governance Journal*, 2(01), 1-11.
<http://dx.doi.org/10.56444/psgj.v2i01.1960>.
- Kesuma, M. N., & Astuti, E. T. (2020). Kajian indeks modal manusia dan peranannya dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia 2015-2018. *In Seminar Nasional Official Statistics*, 2020(1), 817-824.
<https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.523>.
- Kim, J., Lee, W. J., & Shin, K. (2016). A model of gender inequity and economic growth. *Adb Economics Working Paper Series No. 475*, 1-29. Diunduh pada link <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/180687/ewp-475.pdf>. Diakses pada 26 Mei 2023.
- Koilam, C. T. C., Kalangi, J. B., & Rompas, W. F. I. (2023). Pengaruh pengeluaran pemerintah dan pengeluaran konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(5), 25-36.
- Laili, M. H., & Damayanti, A. (2018). Kesenjangan upah antargender di Indonesia: Bukti empiris di sektor manufaktur. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 1-21.
<https://doi.org/10.21002/jepi.v0i0.1096>.
- Lativa, S. (2021). Analisis kebijakan fiskal Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dalam meningkatkan perekonomian. *Jurnal Ekonomi*, 23(3), 161-175.
<https://doi.org/10.37721/je.v23i3.869>.

- Li, J., Huang, D. Q., Zou, B., Yang, H., Hui, W. Z., Rui, F., Natasha, T. S. Y., Liu, C., Nerukar, N. N., Kai, J. C. Y., Teng, M. L. P., Li, X., Zeng, H., Borghi, J. A., Henry, L., Cheung, R., & Nguyen, M. H. (2020). Epidemiology of Covid-19: A systematic review and meta-analysis of clinical characteristics, risk factors, and outcomes. *J Med Virol*, August, 1–10. <https://doi.org/10.1002/jmv.26424>.
- Lusiarista & Arif, M. (2022). Peran perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi di Karesidenan Pati periode 2015-2020. *Social Science Studies*, 2(3), 197-214. <http://dx.doi.org/10.47153/sss23.3792022>.
- Manggala, G. D. (2020). Analisis perkembangan dan proyeksi perekonomian Indonesia dari tahun 2014-2020 setelah adanya pandemi corona. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBSIS)*, 2(1), 1-5.
- Minasyan, A., Zenker, J., Klasen, S., & Vollmer, S. (2019). Educational gender gaps and economic growth: A systematic review and meta-regression analysis. *World Development*, 122, 199–217. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.05.006>.
- Muhartono, D., S. (2020). Pentingnya regulasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kediri. *Publiciana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 13(2), 117-134.
- Napitupulu, F., & Ekawaty, M. (2022). Ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi: Studi kasus pada negara-negara Asia Timur Dan Pasifik. *Journal Of Development Economic And Social Studies*, 1(1), 29-43. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2022.01.14>.
- Nastiti, N. N., & Harikesa, I. W. A. (2023). Fenomena penyebaran pandemi Covid 19 dan kesenjangan gender di Asia Tenggara (studi kasus: Dampak Covid 19 terhadap pemenuhan hak asasi perempuan di Indonesia (2020-2021). *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 8(01), 109-132. <https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1567>.
- Nasution, E. Y., Hariani, P., Hasibuan, L. S., & Pradita, W. (2020). Perkembangan transaksi bisnis e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 506-519. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.227>.
- Nazmi, L., & Jamal, A. (2018). Pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 3(4), 740-750.
- Nugroho, A., & Clarissa A. (2022). *Kajian penghitungan indeks ketimpangan gender 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Nuraeni, Y., & Suryono, I. L. (2021). Analisis kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 68-79. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>.
- Nursini, N. & Syahrul, S. (2022). Tinjauan peran kualitas gender dalam pembangunan ekonomi. *Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial*, 1(2), 14-27.
- Panjaitan, H. A. M., Mulatsih, S., & Rindayati, W. (2019). Analisis dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 8(1), 43-61. <https://doi.org/10.29244/jekp.8.1.2019.43-61>.
- Pertiwi, U. E., Heriberta, H., & Hardiani, H. (2021). Pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 1(2), 69-76. <https://doi.org/10.53867/JEA.v1i2.17>.
- Prasetyawati, N. (2018). Perspektif Gender Dalam Pembangunan Nasional Indonesia. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, (5), 53-60. <http://dx.doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4421>.
- Putri, G. S. (2020). *WHO resmi sebut virus corona Covid-19 sebagai pandemi global*. Diunduh pada link <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-Covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>. Diakses pada 11 April 2023.

- Rahmawati, R. (2020). Implementasi undang-undang desa no. 6 tahun 2014 tentang penyetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 2(2), 16-35. <https://doi.org/10.48093/jiask.v2i2.22>.
- Ridhwani, I., & Lestari, Y. (2023). Rekonstruksi kebijakan publik dan hukum islam terkait gender dalam mencapai SDGs. *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial*, 3(1), 37-52.
- Ruiters, M., Charteris, A., 2020. Gender equality in labour force participation, economic growth and development in South Africa. *Dev. South. Afr.* 37, 997–1011. <https://doi.org/10.1080/0376835X.2020.1772042>.
- Sari, C. P. (2021). Gender inequality: Dampaknya terhadap pendapatan per kapita (studi kasus 33 provinsi di Indonesia 2011-2019). *Berdikari: Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia*, 1(1), 47-52. <http://dx.doi.org/10.11594/jesi.01.01.06>.
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (2022). *Situasi Covid-19 di Indonesia*. Diunduh pada link <https://Covid19.go.id/artikel/2022/12/31/situasi-Covid-19-di-indonesia-update-31-desember-2022>. Diakses pada 11 April 2023.
- Siregar, L. H. M., & Rizky, M. (2022). Penerapan error correction mechanism dalam pemodelan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2021. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 551-559. <https://doi.org/10.53866/jimi.v2i3.150>.
- Siscawati, M., Adelina, S., Eveline, R., Siscawati, M., Adelina, S., Eveline, R., & Anggriani, S. (2020). Gender equality and women empowerment in the national development of Indonesia. *Journal of Strategic and Global Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.7454/jsgs.v2i2.1021>.
- Sitorus, A. V. Y. (2016). Dampak ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Sosio Informa Kesejahteraan Sosial*, 2(1), 89-101. <https://doi.org/10.33007/inf.v2i1.190>.
- Suryanti, M. & Sholikhah, N. (2021). Gender gap sebagai determinan ketimpangan pendidikan kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. *FORUM EKONOMI*, 23(2), 285-294.
- Sutrisno, B. (2020). 50 days of Indonesia's partial lockdown. Is it enough for the 'new normal'? retrieved from Jakarta post. Diunduh pada link <https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/28/50-days-of-indonesias-partial-lockdown-is-it-enough-for-the-new-normal.html>. Diakses pada 11 April 2023.
- Tasmilah, T. (2022). Determinan keluarnya perempuan dari pasar tenaga kerja pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Aplikasi Statistika & Komputasi Statistik*, 14(1), 63-76. <https://doi.org/10.34123/jurnalasks.v14i2.361>.
- Udzma, N. S., Hamid, A., & Herwati. (2023). Analisis ketidakadilan gender dalam budaya patriarki menurut Karin Van Nieuwkerk dalam buku women embracing Islam. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 6(3), 1709-1716. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i3.1438>.
- UNDP. (2016). Human development report 2016: Human development for everyone. *UNDP, New York*. Diunduh pada link <https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/IDN>. Diakses pada 11 April 2023.
- Wiasti, N. M. (2017). Mencermati permasalahan gender dan pengarusutamaan gender (pug). *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, 1(1), 29-42.
- World Bank. (2021). World Bank national accounts data, and OECD national accounts data files. Diunduh pada link <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2021&start=1961>. Diakses pada 11 April 2023.
- Yasin, M. (2020). Analisis pendapatan asli daerah dan belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 3(2), 465-472. <https://doi.org/10.31539/costing.v3i2.1161>

